

Kebijakan Pelaksanaan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) Berbasis Sekolah di Karawang

OonSopiah

onspisupriantoro@gmail.com.

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur Karawang 41361

Abstrak

PIK R merupakan salah satu wadah remaja dalam pelayanan informasi dan konsultasi KRR. Kelompok PIKR berbasis sekolah di Karawang mencapai 2,63%. Tujuan penelitian untuk mengetahui Kebijakan Pelaksanaan PIK R Berbasis Sekolah Tahun 2015. Desain menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan metode analisis kebijakan *Policy Analytical Process* versi *Patton-Savicky*, disajikan berdasarkan *Michael Hill* dengan format *analysis of policy*. Penelitian dilakukan di tiga institusi sekolah. Informan kunci terdiri dari ketua, PS dan KS. Informan pendukung terdiri dari kepala PKBR dan Hak Reproduksi, Kepala UPT, PLKB, Kepala Sekolah, Guru BK, siswa-siswi yang ikut serta dan tidak ikut serta kegiatan PIK R. Penelitian menggunakan studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi. Metode analisis menggunakan Tematik. Hasil penelitian menemukan keterbatasan kebijakan melakukan sosialisasi dan promosi. BKBPP segera melakukan strategi yang menarik minat remaja dalam melakukan promosi dan sosialisasi PIK R ke seluruh institusi sekolah dan bekerjasama dengan instansi terkait.

Kata Kunci: Kebijakan, Promosi dan Sosialisasi, PIK R

Abstrac

PIK R is one of the juvenile containers in information and consultancy services of KRR. School-based PIK R groups in Karawang accounted for 2.63%. The purpose of this research is to know the Policy of Implementation of School Based PIK R in 2015. Design using qualitative method with case study approach, using Patton-Savicky Policy Analytical Process analysis method, presented based on Michael Hill with analysis of policy format. The study was conducted in three school institutions. Key informants consist of chair, PS and KS. The supporting informants consisted of head of PKBR and Reproduction Rights, Head of UPT, PLKB, Principal, BK Teachers, students who participated and did not participate in PIK R activities. The study used documentation study, in-depth interviews, and observation. The analysis method uses Thematic. The research finds the limitations of the policy of socialization and promotion. BKBPP immediately conducted a strategy that attracts teenagers in promoting and socializing PIK R to all school institutions and cooperating with related institutions.

Keywords: Policy, Promotion and Socialization, PIK R

Pendahuluan

1. Pendahuluan

Kehidupan masa remaja merupakan peralihan dari kanak–kanak ke dewasa yang merupakan masa transisi¹. Peningkatan jumlah remaja akan mempengaruhi Angka Fertilitas Total/*TFR*² dan dihadapkan dengan berbagai resiko Triad KRR³, padahal remaja merupakan potensi bagi pembangunan⁴. Selain itu, rendahnya pengetahuan remaja tentang KRR, median usia pertama perempuan menikah yang masih rendah, serta pemenuhan hak reproduksi remaja belum sepenuhnya didapatkan. Hal ini terjadi karena tempat pelayanan konsultasi yang ramah remaja masih sangat sedikit⁵.

Pemerintah Indonesia juga berupaya menindaklanjuti permasalahan tersebut melalui BKKBN dengan Program GenRe dengan mengembangkan PIKR melalui “*New Initiative*” Tahun 2014⁶.

PIK R merupakan salah satu wadah yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja yang memberikan informasi dan konsultasi tentang PUP, 8 fungsi keluarga, *Triad* KRR, keterampilan hidup, gender dan keterampilan advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi. Keberadaan dan peranannya sangat penting sekali membantu remaja mendapatkan informasi dan konsultasi yang cukup dan benar tentang penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja, dengan mengedepankan kegiatan promotif dan preventif. Selanjutnya pada tahun 2012, BKBPP sub bidang

PKBR dan Hak Reproduksi melakukan sosialisasi tentang PIK R dengan harapan dapat menjawab *issue* seputar permasalahan remaja di Karawang⁷.

Tahun 2014 sasaran remaja berbasis sekolah SLTP sebanyak 95.725, SMA 30.448, dan SMK 42.312 yang tersebar di 263 institusi sekolah, yang merupakan PR besar bagi BKBPP untuk merealisasikan pembentukan dan pengembangan PIK R melalui kegiatan sosialisasi dan promosi terlebih dahulu.

Saat ini sudah terbentuk sepuluh kelompok PIK R sekolah. BKBPP melakukan gerakan "*New Inisiative*" yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya "PIK R Tegar" berbasis sekolah dengan melakukan orientasi kepada 104 orang guru BK dan 208 siswa-siswi sebagai Pendidik Sebaya. Kegiatan tersebut menghasilkan empat kelompok PIK R sebagai "Model PIK R Tegar" yang merupakan "*Pilot Projek*"⁸.

Pada tahun 2015 kelompok PIK R mencapai 2,63%. Dengan kelompok PIK R yang sangat sedikit, tidak akan cukup memberikan informasi dan konseling untuk menjawab permasalahan-permasalahan remaja di sekolah, sehingga peneliti memandang perlu untuk dilakukannya suatu kajian komprehensif mengenai kebijakan dalam pelaksanaan PIK R Berbasis Sekolah di Karawang Tahun 2015⁸.

Hasil penelitian sebelumnya tentang pelaksanaan PIK R pada Siswa Kelas XI SMAN 5 Yogyakarta tahun 2012 menunjukkan hasil : (1) tahap

perencanaan meliputi pemilihan konselor sebaya dan pemilihan materi PIK R, (2) tahap pelaksanaan meliputi pensosialisasian pengetahuan KRR, (3) tahap evaluasi meliputi terlaksananya seluruh kegiatan dengan baik, (4) faktor pendukung meliputi: peran guru bimbingan konseling, kesadaran siswa akan pentingnya pengetahuan KRR, (5) faktor penghambatnya adalah: pengkaderisasian pengurus yang kurang maksimal, terjadi pergantian jabatan kepala sekolah, masalah waktu, dan kesibukan masing-masing pihak yang terlibat⁹.

Rumusan masalah berdasarkan studi pendahuluan, didapatkan informasi bahwa pelaksanaan PIK R belum berjalan dengan optimal karena; (1) siswa-siswi memiliki waktu yang terbatas, (2) pengelola memiliki masa jabatan 1-2 tahun, (3) jumlah setiap kelompok sekitar 50-100 orang dengan 1 pembina, (4) belum adanya kebijakan operasional yang mengatur pelaksanaan PIK R, (5) sosialisasi dan promosi masih kurang, (6) PIK R belum wajib, (7) jadwal sekolah sangat padat, (8) kegiatan informasi dan konseling belum kontinyu, (9) Kesulitan dalam pencatatan dan pelaporan, (10) sarana dan prasarana sangat terbatas (11) belum ada PERDA, (12) kerjasama lintas program dan sektor masih kurang, dan (13) Anggaran untuk kegiatan sangat terbatas.

Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinyakebijakan operasional pelaksanaan pusat informasi konseling remaja (PIK R) pada remaja SLTP dan SLTA di Karawang Tahun 2015.

2. Metode

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menggunakan metode *Policy Analytical Process* dari versi *Patton-Savicky* dan disajikan melalui cara yang digunakan oleh *Michael Hill* dengan format *analysis of policy*.

Penelitian dilaksanakan di SMKN 3 Kondang Jaya, SMPN 3 Karawang, dan SMPIT Mentari Ilmu pada bulan Januari 2015 s.d September 2015. Informan pada penelitian dipilih berdasarkan karakteristik sesuai tujuan yang ingin dicapai dengan teknik *purposive sampling* dan strategi variasi maksimal. Informan terdiri dari informan kunci dan informan pendukung.

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi. Teknik analisa data interaktif terdiri dari empat tahap, yaitu reduksi data, *display data*, dan verifikasi data.

Pengujian instrumen penelitian melalui validitas dan reliabilitas untuk meningkatkan derajat penelitian yang bersifat autentik dan memiliki interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis sebelum di lapangan, analisis selama di lapangan dan analisis setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian hanya mendapatkan alternatif rekomendasi kebijakan operasional tentang pelaksanaan PIK R.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian kualitatif yang dilakukan terkait kebijakan pelaksanaan PIK R berdasarkan tujuan yang telah disusun sebelumnya.

3.1. *Verify, Define, and Detail the Problem*

Hasil analisis tematik mengidentifikasi lima tema pada penelitian ini, yaitu : (1) PERDA; (2) Sosialisasi dan Promosi; (3) Kurikulum tambahan/Ekstrakurikuler; (4) Sarana dan prasarana; (5) SDM.

3.2. Peraturan Daerah (PERDA)

Berdasarkan hasil penelitian, PIK R di SLTP dan SLTA Kabupaten Karawang mengacu kepada Peraturan Kepala BKKBN tentang Pedoman Pengelolaan PIK R. Pelaksanaan harus diperkuat dengan adanya PERDA. Karawang sudah memiliki PERDA Kepemudaan dan Kota Layak Anak (KLA) yang di dalamnya memuat aspek keremajaan. BKBPP sudah merancang PERDA tentang KB yang di dalamnya mengatur PIK R, dan saat ini dalam tahap konsultasi dengan pakar hukum. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“.....kalau melihat dari segi program yang berkesinambungan memang harus dimasukan ke PERDA, menjadikannya program unggulan.....”(X₁₃)

“.....kalo memang ada PERDA lebih kuat, ada saling keterkaitan, ada payung hukum, dan lebih enak menyampaikannya.....”(X₉)

Untuk merespon permasalahan remaja, pemerintah melakukan berbagai program dan kegiatan yang disebar ke instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan⁶. Hasil penelitian sejalan dengan teori karena untuk merespon

permasalahan remaja di Karawang sudah memiliki PERDA yang berkaitan dengan remaja dan BKBPP sudah merancang PERDA KB. Rancangan PERDA KB harus segera diajukan ke DPRD dan PEMDA sehingga pelaksanaan PIK R memiliki aturan dan payung hukum. Setelah di syahkan, selanjutnya disosialisasikan ke pihak-pihak terkait.

3.3. Sosialisasi dan Promosi

Berdasarkan hasil penelitian, saat ini kebijakan sosialisasi dan promosi mengacu kepada buku pedoman PIK R. Kegiatan dilakukan pada saat di sekolah mengadakan penerimaan siswa baru/MOS. Berikut hasil wawancara mendalam dengan informan :

“.....sosialisasi ke sekolah-sekolah dilakukan sesekali, tidak kontinyu”(X₁₁)

“.....sekolah memberikan keleluasaan untuk promosi pada saat PSB dan MOS.....”(X₁₈)

“.....kebijakan operasional sosialisasi tetap regulasinya pedoman, kemudian dalam pelaksanaannya kami selalu mengadakan dulu Rakor-rakor”(X₈)

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pengelola PIK KRR mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan sehingga harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran¹⁰. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian karena pengelola PIK R sudah melakukan kegiatan komunikasi kepada kelompok sasaran melalui kegiatan sosialisasi dan promosi walaupun belum dilakukan dengan optimal dan menyeluruh. BKBPP harus membuat jadwal kunjungan ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi dan promosi tentang pelaksanaan PIK R.

3.4. Menetapkan Kurikulum Tambahan

Berdasarkan hasil penelitian bahan pelajaran dalam pelaksanaan PIK R berupa materi-materi yang berhubungan dengan KRR yang penyampaianya dapat disesuaikan dengan kurikulum yang sudah ada.

Berikut hasil wawancara dengan in forman :

“.....bagus juga kalau dimasukin ke kurikulum. Mungkin kendalanya banyak ya...”(X₁₂)

‘.....kurikulum harus secara ilmiah melalui penelitian, harus ada pendalaman, secara hakikat pendekatannya ke mata pelajaran olah raga, biologi, dan harus ada legalitasnya.....” (X₁₄)

“.....harus ada silabus tentunya.....”(X₁₈)

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu¹¹. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan PIK R harus memiliki pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran melalui kurikulum. Penelitian lain tentang kurikulum kesehatan, menunjukkan ada sepuluh materi pendidikan kesehatan yang paling banyak dipilih oleh Guru untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa PIK R dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan sebagai tambahan kurikulum karena didalamnya terdapat materi-materi KRR yang sangat penting untuk kesehatan remaja. BKBPP harus

mengusulkan kepada Disdikpora untuk menjadikan PIK R sebagai kurikulum tambahan.

3.5. Pelaksanaan PIK R sebagai Ekstrakurikuler

Berdasarkan hasil penelitian bahwa saat ini terdapat satu kelompok PIK R yang sudah menjadi eskul. Untuk menjadi eskul harus disusun *blue printnya* terlebih dahulu untuk sebagai salah satu panduan kegiatan. Berikut hasil wawancara mendalam dengan informan

“.....mengacu kepada Provinsi bahwa PIK R harus menjadi suatu program ekstrakurikuler.....”(X₈)

“.....sangat bagus sekali karena semua anak-anak tau bahwa dalam PIK R ini tentang bahaya narkoba, sex bebas”(X₆)

“.....pertama harus ada bluprintnya sebelum jadi Eskul.....”(X₁₅)

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan diluar jam pelajaran untuk membantu perkembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat¹¹. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa PIK R akan dijadikan sebagai salah satu pilihan ekstrakurikuler untuk menjadikan remaja berwawasan kesehatan serta memiliki minat, bakat dan potensi dalam kegiatan KRR. Hasil penelitian lain tentang nilai karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler di Banjarmasin adalah kerja keras, disiplin, tanggung jawab, religius, demokratis, rasa ingin tahu, bersahabat, komunikatif, cinta tanah air, jujur, toleransi, semangat kebangsaan, cinta damai, kreatif, peduli lingkungan, peduli sosial, menghargai prestasi, gemar membaca dan mandiri¹². Hal ini sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan PIK R yaitu menjadikan remaja memiliki karakter yang baik, menjadi idola dan contoh bagi teman sebayanya.

BKBPP, Disdikpora dan seluruh pimpinan sekolah harus membuat kebijakan untuk menjadikan PIK R sebagai salah satu pilihan eskul.

3.6. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian, sarana prasarana merupakan penunjang yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan pemberian informasi dan konseling. Saat ini ruangan konseling menggunakan ruangan BK dan kegiatan dilakukan di ruangan kelas, ruang OSIS, PMR dan yang lainnya. Media yang digunakan berupa leptop dan lembar balik yang difasilitasi BKBPP, tetapi itupun sangat terbatas. Akses terhadap *hot line*, jaringan internet dan jejaring sosial bersifat pribadi dan belum terpusat di BKBPP. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“.....iya belum punya ruangan khusus gitu.....” (X₄)

“....kita pakai ruangan-ruangan kelas, sementara bareng dengan PMR.....” (X₁₇)

“....Kurang ya, gendre kitanya cuma 1, tidak sebanding dengan jumlah siswa, sehingga kurang menarik, kita coba cara lain biar lebih menarik.....” (X₁₇).

Sarana prasarana yang harus ada dalam pelaksanaan PIK R adalah ruang konseling, ruang pertemuan, perpustakaan, hot line/SMS konseling, jaringan internet, serta akses terhadap jejaring sosial seperti facebook, twitter, dll⁶. Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori karena kelompok PIK R memiliki sarana prasarana yang sangat terbatas. BKBPP dengan sekolah harus memfasilitasi kelengkapan dari sarana dan prasarana tersebut.

3.7. Peningkatan SDM

Untuk peningkatan SDM, BKBPP bersama BKKBN provinsi mengadakan pelatihan dan orientasi kepada Guru BK, PS dan KS. Berikut pernyataan informan :

“.....kadang-kadang kita juga pelatihan-pelatihan..... (X₁₁)

Pelatihan dilakukan untuk memperbaiki efektifitas dalam mencapai hasil kerja yang ditetapkan, dengan maksud memperbaiki penguasaan keterampilan dan tehnik-tehnik pelaksanaan pekerjaan tertentu, terinci dan rutin. Seorang petugas yang peduli remaja seharusnya memiliki karakteristik antara lain perhatian dan peduli, bersahabat, kompeten dalam melayani remaja, menghargai remaja, empati, komunikasi yang efektif, hubungan antar personal baik, kemampuan mengendalikan emosi, berfikir kritis, mampu membuat keputusan dan pemecahan masalah, selain itu harus memiliki kompetensi teknis dalam memberikan pelayanan khusus pada remaja¹³. Hasil penelitian sejalan dengan teori di atas karena sudah dilakukan pelatihan dan orientasi untuk SDM sehingga memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan khusus pada remaja, walaupun masih terbatas. BKBPP harus memfasilitasi kembali pelatihan dan orientasi tersebut bagi SDM yang baru ataupun kegiatan *upgrading* bagi yang lama.

3.8. Analisis of Policy

Penelitian kebijakan operasional menghasilkan *analisis of policy* berupa empat komponen yaitu isi, implementasi, hasil dan lingkungan

kebijakan operasional di Karawang tentang pelaksanaan PIK R Berbasis Sekolah. Temuan analisis kebijakan operasional, ditampilkan dalam tabel 1.

3.9. Menetapkan dan Penerapan Kriteria Isu

Berdasarkan hasil USG, terdapat lima keterbatasan yang menjadi prioritas utama yang disajikan dalam tabel 2. Berdasarkan hasil analisis matrik USG dengan membuat rangking dari total nilai tertinggi, maka faktor yang menjadi prioritas masalah adalah “Keterbatasan BKBPP Kabupaten Karawang dalam melakukan sosialisasi dan promosi terkait materi dan pelaksanaan PIK R sekolah”.

Tabel 1.
Analisis Kebijakan Operasional Pelaksanaan PIK R pada Remaja SLTP dan SLTA di Karawang tahun 2015

<i>ANALISIS OF</i>	<i>ANALISIS FOR</i>
<p>Isi Kebijakan Operasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan PIK R diperkuat dalam PERDA. 2. Promosi dan sosialisasi harus menarik minat remaja dengan kebijakan Disdikpora 3. PIK R dijadikan sebagai kurikulum tambahan/ ekstrakurikuler. 4. Sarana prasarana harus memadai 5. Peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan, workshop dan seminar 	<p>Evaluasi Kebijakan Operasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada PERDA khusus PIK R 2. Sebagian kecil sekolah mendapatkan sosialisasi dan promosi 3. Kurangnya pendekatan untuk memasukkan PIK R ke dalam kurikulum tambahan dan kegiatan ekstrakurikuler. 4. Sarana prasarana sangat terbatas 5. Peningkatan SDM masih terbatas
<p>Implementasi Kebijakan Operasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya yang dilakukan untuk penyusunan PERDA melalui koordinasi dengan PEMDA dan dinas terkait 2. Upaya yang dilakukan untuk kegiatan sosialisasi dan promosi secara otomatis pada saat MOS dan PSB serta atas 	<p>Alternatif Kebijakan Operasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dan komitmen secara tertulis dengan Disdikpora terkait usulan PERDA dalam pelaksanaan PIK R sekolah 2. Mengadakan kerjasama dan

<p>permintaan sekolah</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Upaya yang dilakukan untuk memasukkan PIK R sekolah ke kurikulum tambahan dan kegiatan ekstrakurikuler melalui pembuatan pedoman dan pendekatan kepada kepala sekolah untuk mengusulkan ke Disdikpora 4. Sarana prasarana disediakan dari KBPPP Provinsi 5. Peningkatan SDM dilaksanakan melalui pelatihan yang terbatas pada Guru BK, PS dan KS <p>Kinerja (hasil) Kebijakan operasional</p> <p>Hasil yang dicapai dari berbagai kegiatan dan upaya yang telah dilakukan masih kurang dan belum optimal</p> <p>Lingkungan Kebijakan Operasional</p> <p>Lingkungan terhadap implementasi dan hasil kebijakan operasional belum seluruhnya kondusif karena kurangnya koordinasi antara instansi terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan demi terselenggaranya kebijakan operasional di atas</p>	<p>kemitraan dengan institusi sekolah kesehatan terkait Pembentukan PIK R sekolah</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pendekatan kepada kepala sekolah dan disdikpora untuk memfasilitasi PIK R ke dalam kurikulum tambahan dan kegiatan Ekstrakurikuler 4. Sarana prasarana diupayakan untuk dilengkapi secara mandiri dari sekolah, khususnya untuk ruangan konseling 5. Melakukan pelatihan di tingkat KBPPP setiap triwulan secara berkesinambungan
---	--

Sumber : Hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen, 2015

Tabel 2
Matrik USG Pemilihan Issu Aktual dalam Pelaksanaan PIK R pada
Remaja SLTP dan SLTA di Karawang Tahun 2015

No	Issu Aktual	U	S	G	Total	Rangking
1	Keterbatasan BKBPP Kabupaten Karawang dalam melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Karawang terkait dengan penyusunan PERDA untuk Pelaksanaan PIK R.	5	3	4	12	IV
2	Keterbatasan BKBPP Kabupaten Karawang dalam melakukan sosialisasi dan promosi terkait materi dan pelaksanaan PIK R.	5	5	5	15	I
3	Keterbatasan BKBPP Kabupaten Karawang untuk menjadikan pelaksanaan PIK R sebagai kegiatan Ekstrakurikuler di sekolah	4	4	3	11	V
4	Keterbatasan BKBPP untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan PIK R.	5	4	4	13	III
5	Keterbatasan BKBPP untuk memfasilitasi SDM baik dari kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan PIK R.	5	4	5	14	II

Sumber : *Hasil wawancara mendalam*

4. Kesimpulan

Permasalahan dalam pelaksanaan PIK R sekolah di Karawang yaitu masih adanya keterbatasan dalam menentukan kebijakan. Kriteria evaluasi yang didapatkan adalah (1) sosialisasi dan promosi; (2) SDM; (3) Sarana Prasarana; (4) PERDA; dan (5) Kurikulum tambahan ataupun ekstrakurikuler. Kebijakan diperlukan untuk memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan PIK R Berbasis Sekolah.

5. Saran

BKBPP segera melakukan srtrategi yang menarik minat remaja khususnya promosi dan sosialisasi PIK R ke seluruh institusi sekolah. Bekerjasama dengan Disdikpora dan intansi terkait dalam menentukan kebijakan pelaksanaan PIK R Berbasis Sekolah.

6. Daftar Pustaka

1. BKKBN. Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) ditinjau dari aspek 8 fungsi keluarga, kesehatan, ekonomi, psikologi, pendidikan, agama dan sosial. Bandung. SUSEDA Jabar; 2011.
2. SDKI. Sensus Penduduk; 2011.
3. Sensus penduduk; 2010.
4. Notoatmodjo. Ilmu perilaku kesehatan: Rineka Cipta. Jakarta; 2010.
5. Outlook. Kesehatan reproduksi remaja, membangun perubahan yang bermakna. Januari 2000 Vol. 16. Path UNFA; 2000.
6. BKKBN. Pedoman pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (PIK-R/M). Jakarta; 2014.
7. BKBPP. Buku laporan kegiatan; Karawang; 2014

8. BKBPP. Rakerda pembangunan KB dan PP Kabupaten Karawang Tahun 2015. Optimalisasi kinerja program KB, pembangunan keluarga dan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan target sasaran renstra dan RPJMD Tahun 2011-2015 menuju keluarga kecil berkualitas. Karawang; 2015.
9. Srenggani. (2013). Pelaksanaan program pusat informasi konseling remaja pada siswa kelas XI SMAN 5 Yogyakarta tahun pelajaran 2012/2013. E Journal Bimbingan dan Konseling, Vol. II No. 7 Tahun 2013. Yogyakarta.
10. Alyas. Implementasi kebijakan kesehatan reproduksi remaja studi kasus pada SMAN 5 Makassar. Jurnal Administrasi Publik, Volume I, No. 1 Tahun 2011. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, No. 1, Tahun 2011. Makassar; 2011.
11. Depdiknas. Model kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Jakarta; Pusat. Kurikulum Dekdiknas; 2006.
12. Hermawan. Ekstrakurikuler, mengembangkan potensi siswa;2000.
13. BKKBN. *Membantu Remaja Memahami dirinya*. Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan hak-hak reproduksi; 2007.